



PENABULU FOUNDATION
RESEARCH INSTITUTE

RENCANA STRATEGIS
2019 – 2021



Kertas Kerja Penyusunan

RENCANA STRATEGIS 2019 – 2021

“The saddest aspect of life right now is
that science gathers knowledge faster
than society gathers wisdom”

(Isaac Asimov)

Penabulu Research Institute
(Institut Riset Penabulu)

Badan Pelaksana Kegiatan Yayasan Penabulu

18 Oktober 2018

A. SEJARAH PENDIRIAN

Yayasan Penabulu didirikan di Jakarta sejak tahun 2002, dan disahkan oleh notaris Riana Hutapea, notaris di Jakarta, melalui Akta No.1 tertanggal 22 Oktober 2003 dan dikukuhkan melalui SK Menteri Hukum dan HAM RI No: C-435 HT.01.02.TH 2004. **Visi Yayasan Penabulu adalah: terwujudnya masyarakat sipil Indonesia yang berdaya.**Sedangkan Misi Yayasan Penabulu adalah: mendorong keberdayaan dan keberlanjutan posisi dan peran organisasi masyarakat sipil di Indonesia melalui upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas organisasi; mobilisasi, pengelolaan dan penyaluran sumber daya; pengembangan kemitraan setara antar sektor pembangunan serta penggalangan partisipasi dan keterlibatan publik seluas-luasnya.

Setelah 15 tahun lebih bekerja pada isu penguatan masyarakat sipil di Indonesia, Penabulu kini mendorong dirinya untuk mengambil peran sebagai **‘civil society resource organization’**(CSRO). Sebagai organisasi sumber daya bagi masyarakat sipil di Indonesia, Penabulu berusaha sebaik-baiknya memobilisasi, mengelola dan menyalurkan sumber daya dalam berbagai bentuk demi mendukung kerja-kerja masyarakat sipil di Indonesia. Penabulu sedapat mungkin mengkonversi energi yang diperoleh bagi upaya-upaya penguatan, pemberdayaan dan penjaminan keberlanjutan organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia. Penabulu bekerja untuk merubah energi menjadi ruang tumbuh bersama, ruang konsolidasi kekuatan ide, gagasan dan keberpihakan masyarakat sipil di Indonesia, menjadi pemicu dan pemacu tata kelola pembangunan Indonesia yang lebih berkelanjutan di masa depan.

Dalam kerangka implementasi strategi CSRO tersebut di atas, pada akhir 2018, **Badan Pengurus Yayasan Penabulu** membentuk **Badan Pelaksana Kegiatan**, sesuai dengan peluang yang diberikan oleh Pasal 35 UU Yayasan No 16/2001 dan sesuai dengan AD/ART Yayasan Penabulu. Terdapat tiga Badan Pelaksana Kegiatan yang dibentuk bersamaan oleh Yayasan Penabulu, yaitu: **(1) Badan Pelaksana Kegiatan Manajemen Hibah Penabulu/ Penabulu Grant Management**, **(2) Badan Pelaksana Kegiatan Institut Riset Penabulu/ Penabulu Research Institutedan** dan **(3) Badan Pelaksana Kegiatan Jejaring Implementasi Penabulu/ Penabulu Implementing Network**. **Institut Riset Penabulu** secara resmi dilegalisasi pada tanggal 24 Oktober 2018 berdasarkan akta notaris No. 29 oleh Kokoh Henry, SH, MKn, notaris di Jakarta(*Akta pembentukan terlampir*).

B. MANDAT PENDIRIAN

Pendirian **Institut Riset Penabulu**memilikidua tujuan kembar, yaitu tujuan internal bagi penguatan organisasi Penabulu itu sendiri dan tujuan eksternal yang akan menjadi basis intervensi Penabulu menghadapi permasalahan pembangunan terkini.

Mandat Pendirian	Dimensi Internal	Dimensi Eksternal
Pengelolaan Pengetahuanyang Efektif dan Inovatif	Menjadi simpul pengelolaan dan produksi data, informasi dan pengetahuan akumulatif Aliansi Penabulu ¹ . Sistem pengelolaan pengetahuan harus menguatkan kemampuan organisasi sebagai organisasi pembelajar dan membekali organisasi dalam memastikan keberlanjutan ² .	Menjadi pusat peningkatan kapasitas dalam pengelolaan dan produksi/ kreasi data, informasi dan pengetahuan, termasuk pengetahuan lokal dan trans-disiplin. Sebagai CSRO, Penabulu akan mengelola pengetahuan secara terbuka dengan tujuan memberdayakan masyarakat sipil Indonesia.
Mandat Pendirian	Dimensi Internal	Dimensi Eksternal

¹ Penabulu beserta seluruh Cabang Yayasan, Unit Usaha dan Mitra Aliansi Penabulu.

² Keberlanjutan bagi Penabulu diartikan sebagai kemampuan organisasi dalam menemukan ruang-ruang relevansi dan signifikansi baru di dalam dinamika pembangunan Indonesia yang terus berubah dan berkembang pesat.

Mandat Pendirian	Dimensi Internal	Dimensi Eksternal
Penggunaan Riset sebagai Pendekatan Utama Intervensi Program	Penabulu perlu menempatkan riset dan seluruh metodologi riset (terutama dalam bentuk riset aksi) sebagai pendekatan utama dalam intervensi program Penabulu. Dalam membangun kemitraan yang bermaknabersama dengan (termasuk lobi dan advokasi terhadap) aktor pembangunan lainnya (Pemerintah, baik pusat maupun daerah dan Sektor Swasta) setiap intervensi program Penabulu harus didasari atas kesadaran kritis berbasis data dan bukti.	Menjadi pusat peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil Indonesia dalam melakukan lobi dan advokasi berbasis data dan bukti. Penabulu juga diharapkan dapat menjadi simpul/hub bagi (a) pengembangan platform dialog dan kemitraan dengan para aktor pembangunan lainnya, dan (b) pengembangan jejaring organisasi masyarakat sipil sejenis dalam mengusung tema-tema advokasi kebijakan publik tertentu secara terpadu pada level regional dan nasional.
Pengembangan Kelembagaan Riset yang Mumpuni dan Handal sebagai Mitra Strategis Pembangunan	Mengembangkan institusi riset yang mumpuni, handal, akuntabel dan berkelanjutan untuk menempatkan posisi Penabulu sebagai lembaga 'think tank' yang diakui dan dapat menjadi mitra strategis pembangunan dalam penyusunan dan pembaruan kebijakan publik yang strategis.	Pusat komunikasi, edukasi dan peningkatan kesadaran publik, sekaligus mendorong terbangunnya skema 'internediary' yang efektif dalam menjembatani proses konsultasi dan dialog publik yang konstruktif bagi terjadinya pembaruan dan reformasi kebijakan-kebijakan publik di Indonesia.

C. VISI, MISI DAN ISU STRATEGIS

Visi Institut Riset Penabulu: menjadi institusi riset yang mampu menjadi mitra strategis dalam pengembangan dan reformasi kebijakan publik strategis di Indonesia.

Sedangkan **Misi Institut Riset Penabulu 2019 – 2021:**

1. Mengembangkan sistem, media dan instrumen yang efektif dan inovatif bagi pengelolaan dan produksi/kreasi data, informasi dan pengetahuan bagi masyarakat sipil di Indonesia;
2. Mengembangkan riset dan memajukan metodologi riset pada isu-isu strategis pembangunan Indonesia, dalam kerangka kemitraan dengan aktor pembangunan lainnya;
3. Memperkuat komunikasi, edukasi dan penyadaran publik melalui jejaring kampanye, lobi dan advokasi berbasis data dan bukti;
4. Meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan akuntabilitas organisasi agar dapat menjadi lembaga riset yang terpercaya dan diakui sebagai mitra strategis pembangunan pada skala nasional.

Saat ini Penabulu memiliki 9 isu strategis yaitu: (1) pembangunan inklusif, (2) pasar berkelanjutan, (3) kemitraan pemerintah-swasta-komunitas, (4) lingkungan dan perubahan iklim, (5) pemberdayaan Desa, (6) kesehatan publik, (7) akuntabilitas publik, (8) penguatan kelembagaan dan (9) TIK dan pengelolaan pengetahuan, yang selengkapnya dapat dicermati lebih lanjut pada link: <http://penabulufoundation.org/>

Pada periode 2019 – 2021, Institut Riset Penabulu menetapkan 3 isu strategis area riset sebagai turunan dari isu strategis Penabulu di atas, yaitu: **(1) Pasar Berkelanjutan, (2) Lingkungan dan Perubahan Iklim, dan (3) Pemberdayaan Desa.**

Area riset di pilih dengan mempertimbangkan bahwa ketiga isu strategis di atas menyangkut hajat hidup sangat banyak masyarakat di Indonesia. **Pasar yang berkelanjutan** akan mencakup kajian strategis pada aspek rantai nilai, pemenuhan standar (termasuk HAM dan perlindungan anak), tata niaga dan praktik-praktik baik pengelolaan komoditas yang sebagian besar lahannya dimiliki oleh komunitas (small-holder), antara lain: kelapa sawit, kakao, kopi, dan rempah. Pada isu **lingkungan**, kajian strategis akan berfokus pada pengurangan deforestasi dan degradasi kawasan hutan, pengembangan model kelola lanskap berkelanjutan dan produksi berkelanjutan, termasuk di dalamnya isu sampah plastik yang kini menjadi polutan terbesar perairan sungai dan laut Indonesia. Pada isu **perubahan iklim**, kajian strategis akan dilakukan terutama untuk mendukung upaya mitigasi (pengurangan emisi) dari berbagai sektor terutama sektor berbasis lahan, dan upaya adaptasi (peningkatan resiliensi) pada kelompok masyarakat terdampak. Sedangkan pada isu **pemberdayaan Desa**, kajian strategis akan dilakukan untuk mengembangkan model tata ruang Desa, Desa peduli kebakaran hutan dan lahan, Desa tangguh bencana dan kawasan perdesaan gambut, yang disertai kajian pada aspek peningkatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, yang nantinya diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan tata kelola lebih dari 74 ribu Desa di Indonesia.

D. KELEMBAGAAN

Institut Riset Penabulu merupakan salah satu Badan Pelaksana Kegiatan yang dibentuk dan akan bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Yayasan Penabulu. Untuk menjamin keselarasan tujuan dan rencana kerja setiap Badan Pelaksana Kegiatan, maka Badan Pengurus menempatkan 1 orang Komite Pengarah pada masing-masing Badan Pelaksana Kegiatan, yang selain berfungsi sebagai pengawas dan penasihat, juga berperan memberikan arahan strategis bagi pencapaian tujuan-tujuan Badan Pelaksana Kegiatan sesuai mandat yang diberikan oleh Badan Pengurus Yayasan. Struktur organisasi Badan Pelaksana Kegiatan Institut Riset Penabulu dilengkapi dengan posisi Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Badan Pelaksana dan Komite ini diangkat untuk jangka waktu selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Jangka waktu pengangkatan ini terhitung sejujurnya putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Tugas dan tanggungjawab dan kuasa khusus Badan Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggungjawab penuh atas kepengurusan untuk mendorong keberdayaan dan keberlanjutan posisi dan peran organisasi masyarakat sipil di Indonesia melalui upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas organisasi; mobilisasi, pengelolaan dan penyaluran sumber daya; pengelolaan pengetahuan dan advokasi kebijakan publik, pengembangan kemitraan setara antar sektor pembangunan serta penggalangan partisipasi dan keterlibatan publik seluas-luasnya;
- b. Wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan untuk disetujui Badan Pengurus dan disahkan Badan Pembina;
- c. Wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Badan Pengawas;
- d. Berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - mengembangkan kebijakan dan sistem pendukung yang diperlukan bagi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing Badan Pelaksana;
 - mengembangkan kemitraan dan kolaborasi serta mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga maupun dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan;
 - mengembangkan struktur operasi dan melakukan pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien;
 - membeli atau dengan cara lain mendapatkan memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;

- memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - dalam pembuatan Badan Pelaksana pada poin a dan b, Badan Pelaksana perlu mendapatkan persetujuan tertulis dari Badan Pengurus;
- e. Melakukan pengurusan izin-izin dan melaksanakan hal-hal yang berguna agar kegiatan Yayasan berjalan dengan lancar;
 - f. Melakukan penagihan-penagihan dan untuk penerimaannya memberikan dan menandatangani kwitansi serta tanda terima lainnya;
 - g. Badan Pelaksana Yayasan atau sebagai perwakilan Yayasan dikuasakan menghadap dimana perlu, membuat dan menandatangani segala surat dan akta yang diperlukan, memilih- tempat kedudukan hukum, memberi keterangan-keterangan dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk menjalankan dan mengurus segala urusan dan keperluan Yayasan tersebut;
 - h. Setiap anggota Badan Pelaksana wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. **Tidak berwenang** mewakili kewenangan Badan Pengurus Yayasan dalam hal:
 - memindahkan kuasa ini baik sebagian maupun seluruhnya;
 - untuk meminjam dan atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
 - mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri;
 - menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/ membebani kekayaan yayasan;
 - membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
 - mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
 - mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan;
 - j. bahwa segala tindakan yang dilakukan penerima kuasa didalam menjalankan kekuasaan ini yang bertentangan dengan Undang-Undang, Anggaran Dasar Yayasan dan atau ketentuan-ketentuan hukum lainnya adalah tidak sah terhadap Yayasan dan karenanya menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima kuasa.

Tugas dan tanggungjawab dan kuasa khusus Komite Pengarah adalah sebagai berikut:

- a. Bertugas untuk membantu Badan Pengurus dan Badan Pelaksana melalui pemberian arahan strategis, usulan kebijakan pendukung dan pemberian pertimbangan bagi pengambilan keputusan strategis;
- b. Memiliki pengalaman, pengetahuan, keahlian dan jaringan yang berharga bagi pencapaian masing-masing tujuan Badan Pelaksana, yang secara khusus diundang dan dipilih oleh Badan Pengurus dan Pembina serta telah memberikan konfirmasi kesediaan untuk membantu Yayasan dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati;
- c. Mengangkat Anggota Komite dengan surat pengangkatan tersendiri, dengan sepengetahuan Badan Pengurus.

Pada periode awal pembentukan, struktur organisasi Badan Pelaksana Kegiatan Institut Riset Penabulu adalah sebagai berikut:

Komite Pengarah	
(Komite Riset)	: Rival Gulam Ahmad
Ketua	: Setyo Dwi Herwanto
Sekretaris	: Ahmad Sofyan
Bendahara	: Iis Yuni Tri Lestari

E. MITRA / PEMANGKU KEPENTINGAN UTAMA

Mitra utama Institut Riset Penabulu periode 2019 – 2021 disusun berbasiskan 3 isu strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu: **(1) Pasar Berkelanjutan**, **(2) Lingkungan dan Perubahan Iklim**, dan **(3) Pemberdayaan Desa**. Daftar mitra strategis dan bentuk keluaran per masing-masing area riset adalah sebagai berikut:

Area Riset	Mitra Strategis	Target Keluaran
Pasar Berkelanjutan	<p>Pemerintah Pusat: Kementerian Pertanian (Direktorat Perkebunan), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Direktorat Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan).</p> <p>Pemerintah Daerah: Dinas Pertanian/Perkebunan dan dinas lainnya yang terkait di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara (Sulawesi Utara), Kabupaten Pulau Bangka (Kepulauan Bangka Belitung), Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), Kabupaten Kerinci (Jambi), dan Kabupaten Gunungkidul (DI Yogyakarta).</p> <p>Sektor Swasta: KADIN, IBCSD, lembaga Sertifikasi (ISPO, RSPO, UTZ, FSC).</p> <p>Masyarakat Sipil: Serikat Pekerja Kelapa Sawit (SPKS), Dewan Rempah Indonesia (DRI), universitas dan lembaga penelitian setempat.</p>	<p>Kajian tematik, catatan dan rekomendasi kebijakan, bahan komunikasi dan kampanye, platform jejaring advokasi, fasilitasi pertemuan multipihak.</p> <p>Tema Indikatif: rantai nilai, pemenuhan standar (termasuk HAM dan perlindungan anak), tata niaga dan praktik baik pengelolaan komoditas berbasis small-holder (kelapa sawit, kakao, kopi, dan rempah).</p>
Lingkungan dan Perubahan Iklim	<p>Pemerintah Pusat: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Pengendalian Perubahan Iklim), Kementerian Keuangan (Badan Kebijakan Fiskal).</p> <p>Pemerintah Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kehutanan, dan dinas lainnya yang terkait di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Provinsi Papua dan Papua Barat.</p> <p>Taman Nasional: Taman Nasional Gunung Leuser (NAD), Taman Nasional Way Kambas (Lampung).</p> <p>Sektor Swasta: KADIN, IBCSD.</p> <p>Masyarakat Sipil: ZSL, ASEAN Center of Biodiversity (ACB), WWF Indonesia dan LSM lokal lainnya, universitas dan lembaga penelitian setempat.</p>	<p>Kajian tematik, catatan dan rekomendasi kebijakan, bahan komunikasi dan kampanye, platform jejaring advokasi, fasilitasi pertemuan multipihak.</p> <p>Tema Indikatif: deforestasi dan degradasi kawasan hutan, pelestarian kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, kelola lanskap berkelanjutan, produksi berkelanjutan (sustainable sourcing, sampah plastik), upaya mitigasi (pengurangan emisi) sektor berbasis lahan, dan upaya adaptasi (peningkatan resiliensi) pada kelompok masyarakat terdampak.</p>
Pemberdayaan Desa	<p>Pemerintah Pusat: Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Bina Pemerintahan Desa).</p> <p>Pemerintah Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan dinas lainnya yang terkait di Provinsi NAD, Kabupaten. Banyuasin dan Musibanyuasin</p>	<p>Kajian tematik, catatan dan rekomendasi kebijakan, bahan komunikasi dan kampanye, platform jejaring advokasi, fasilitasi pertemuan multipihak.</p> <p>Tema Indikatif: tata ruang</p>

Area Riset	Mitra Strategis	Target Keluaran
	(Sumatera Selatan), Kabupaten Pacitan (Jawa Timur), Kabupaten Gunungkidul(DI Yogyakarta), Kabupaten Jenepono (Sulawesi Selatan) dan Provinsi Papua dan Papua Barat. Masyarakat Sipil: Sinergantara, Perkumpulan Desa Lestari (PDL), universitas dan lembaga penelitian setempat.	Desa, Desa peduli kebakaran hutan dan lahan, Desa tangguh bencana dan kawasan perdesaan gambut, disertai kajian pada aspek ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan.

A. KERANGKA LOGIS PROGRAM

Kerangka logis program Institut Riset Penabuludapat disajikan sebagai berikut:

Kerangka Logis Program Institut Riset Penabulu 2019 – 2021

Project's Hierarchy	Narrative Summary	Objectively Verifiable Indicators(OVIs)	Means of Verification (MoV)	Important Assumptions
GOAL (Overall / Development Objective)	Menjadi institusi riset yang mampu menjadi mitra strategis dalam pengembangan dan reformasi kebijakan publik strategis di Indonesia.	Pengakuan dan keterlibatan Institut Riset Penabulu dalam pengembangan dan reformasi kebijakan publik strategis di Indonesia dalam 3 isu strategis yaitu: (1) Pasar Berkelanjutan, (2) Lingkungan dan Perubahan Iklim, dan (3) Pemberdayaan Desa.	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan yang dikembangkan dan diperbarui pada tingkat nasional maupun lokal pada isu strategis: 1) Pasar Berkelanjutan, (2) Lingkungan dan Perubahan Iklim, dan (3) Pemberdayaan Desa • Jaringan, bentuk-bentuk kemitraan, kolaborasi dan kesepakatan yang terbangun dan terimplementasi secara efektif 	Dukungan sumber daya yang memadai: sumber daya manusia, pengetahuan, teknologi, jejaring, dan pendanaan.
PURPOSE (Immediate Objective)	a. Pengelolaan pengetahuan yang efektif dan inovatif.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem, media dan instrumen yang efektif dan inovatif bagi pengelolaan dan produksi/kreasi data, informasi dan pengetahuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian tematik • Catatan dan rekomendasi kebijakan • Bahan komunikasi dan kampanye • Platform jejaring advokasi • Pertemuan multipihak 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya yang memadai dan dukungan teknologi yang tepat. • Kepemimpinan organisasi yang kuat. • Tingkat kesiapan adopsi organisasi masyarakat sipil di Indonesia.
	b. Penggunaan riset sebagai pendekatan utama intervensi program.	<ul style="list-style-type: none"> • Riset pada isu-isu strategis, dalam kerangkakemitraan dengan aktor pembangunan lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian tematik • Catatan, analisa dan rekomendasi kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya yang memadai. • Iklim pengambilan

Project's Hierarchy	Narrative Summary	Objectively Verifiable Indicators(OVIs)	Means of Verification (MoV)	Important Assumptions
		<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi, edukasi dan penyadaran publik melalui jejaring kampanye, lobi dan advokasi berbasis data dan bukti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan komunikasi dan kampanye • Jurnal dan publikasi hasil kajian • Platform jejaring advokasi • Pertemuan multipihak, seminar dan konferensi 	<p>kebijakan yang baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen para pihak dalam kerangka kemitraan bersama sektor prmbangunan lainnya yang setara. • Keterterimaan hasil kajian oleh para mitra/pemangku kepentingan utama. • Partisipasi publik yang bermakna.
	<p>c. Pengembangan kelembagaan riset yang mumpuni dan handal sebagai mitra strategis pembangunan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas, kapabilitas dan akuntabilitas organisasi sebagai mitra strategis para pengambil kebijakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem dan prosedur (SoP) Kelembagaan, Penelitian, Komunikasi dan Publikasi, SDM, Keuangan dan Administrasi • Dokumen Perencanaan Lembaga dan Rencana/Strategi Riset • Publikasi • Audit Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya dan dukungan pihak lain yang memadai. • Kepemimpinan organisasi yang kuat. • Kesiapan lembaga dalam peningkatan kapasitas dan perubahan cara kerja organisasi.
OUTPUTS	<p>1. Dikembangkannya sistem, media dan instrumen yang efektif dan inovatif bagi pengelolaan dan produksi/kreasi data, informasi dan pengetahuan bagi masyarakat sipil di</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya sistem dan model pengelolaan data, informasi dan pengetahuan yang sesuai dengan karakteristik organisasi masyarakat sipil di Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian tematik • Catatan dan rekomendasi kebijakan • Bahan komunikasi dan kampanye • Platform jejaring advokasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya yang memadai dan dukungan teknologi yang tepat. • Kepemimpinan organisasi yang kuat. • Tingkat kesiapan adopsi organisasi masyarakat sipil

Project's Hierarchy	Narrative Summary	Objectively Verifiable Indicators(OVIs)	Means of Verification (MoV)	Important Assumptions
	Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya sistem produksi/kreasi pengetahuan yang efektif dan inovatif. • Terbangunnya simpul jaringan/hub bagi pengelolaan pengetahuan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. • Terselenggaranya pelatihan-pelatihan reguler dan tematik bagi peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil di Indonesia dalam pengelolaan pengetahuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan multipihak 	di Indonesia.
	2. Dikembangkannya riset dan metodologi riset pada isu-isu strategis pembangunan Indonesia, dalam kerangka kemitraan dengan aktor pembangunan lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Terpetakannya rencana kajian tematik per isu strategis yang terhubung dengan strategi pengelolaan pengetahuan. • Tersusunnya protokol riset per masing-masing judul kajian. • Terbangunnya kemitraan dan kolaborasi dengan para pihak di tingkat nasional maupun lokal sebagai basis 	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian tematik • Catatan, analisa dan rekomendasi kebijakan • Bahan komunikasi dan kampanye • Jurnal dan publikasi hasil kajian • Platform jejaring advokasi • Pertemuan multipihak, seminar dan konferensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya yang memadai. • Iklim perbaikan proses pengambilan kebijakan yang baik. • Komitmen para pihak dalam kerangka kemitraan bersama sektor pembangunan lainnya yang setara. • Keterterimaan hasil kajian

Project's Hierarchy	Narrative Summary	Objectively Verifiable Indicators(OVIs)	Means of Verification (MoV)	Important Assumptions
		<p>pelaksanaan riset.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya riset (aksi) per masing-masing judul kajian dan proses validasi hasil kajian melalui konsultasi publik. • Yersusunnya catatan, analisa dan rekomendasi pengembangan dan pembaruan kebijakan. • Terselenggaranya pelatihan-pelatihan reguler dan tematik bagi peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil di Indonesia dalam penggunaan riset dan metofologi riset sebagai basis intervensi program. 		<p>oleh para mitra/pemangku kepentingan utama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi publik yang bermakna.
	<p>3. Menguatnya komunikasi, edukasi dan kesadaran publik melalui jejaring kampanye, lobi dan advokasi berbasis data dan bukti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya strategi dan kemampuan organisasi dalam komunikasi, edukasi dan kesadaran publik melalui jejaring kampanye, lobi dan advokasi berbasis data dan bukti. • Tersusunnya materi dan bahan-bahan kampanye dan publikasi hasil kajian. 		

Project's Hierarchy	Narrative Summary	Objectively Verifiable Indicators(OVIs)	Means of Verification (MoV)	Important Assumptions
		<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya komunikasi/publikasi, edukasi dan kesadaran publik berdasarkan hasil kajian. • Terbangunnya jejaring advokasi yang efektif pada tingkat nasional. • Terselenggaranya pertemuan-pertemuan multipihak dalam kerangka lobi dan advokasi kebijakan berbasis data dan bukti. 		
	<p>4. Meningkatnya kapasitas, kapabilitas dan akuntabilitas organisasi agar dapat menjadi lembaga riset yang terpercaya dan diakui sebagai mitra strategis pembangunan pada skala nasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terususunnya standar kebijakan dan prosedur (SOP) untuk aspek: Kelembagaan, Penelitian, Komunikasi dan Publikasi, SDM, Keuangan dan Administrasi. • Tersusunnya Rencana Kerja dan Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Tahunan. • Tersusunnya Rencana Strategis periode selanjutnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem dan prosedur (SoP) Kelembagaan, Penelitian, Komunikasi dan Publikasi, SDM, Keuangan dan Administrasi • Dokumen Perencanaan Lembaga dan Rencana/Strategi Riset • Publikasi • Audit Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya dan dukungan pihak lain yang memadai. • Kepemimpinan organisasi yang kuat. • Kesiapan lembaga dalam peningkatan kapasitas dan perubahan cara kerja organisasi.

Project's Hierarchy	Narrative Summary	Objectively Verifiable Indicators(OVIs)	Means of Verification (MoV)	Important Assumptions
		<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhiya kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan. • Terlengkapinya seluruh perangkat kerja dan sistem yang dibutuhkan. • Terlaksananya serial pelatihan peningkatan kapasitas bagi staf internal. • Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi tahunan. • Terlaksananya audit keuangan tahunan. • Terbangunnya strategi dan model penggalan sumber daya bagi keberlanjutan organisasi. 		

Rencana Aktivitas

Output	Kegiatan	Output Kegiatan
<p>1. Dikembangkannya sistem, media dan instrumen yang efektif dan inovatif bagi pengelolaan dan produksi/kreasi data, informasi dan pengetahuan bagi masyarakat sipil di Indonesia.</p>	<p>1.1. Membangun sistem dan model pengelolaan data, informasi dan pengetahuan yang sesuai dengan karakteristik organisasi masyarakat sipil di Indonesia.</p>	<p>Adanya sebuah sistem dan model pengelolaan data, informasi dan pengetahuan yang sesuai dengan karakteristik organisasi masyarakat sipil di Indonesia.</p>
	<p>1.2. Membangun sistem produksi/kreasi pengetahuan yang efektif dan inovatif.</p>	<p>Adanya Sosialisasi dan kampanye Pengelolaan Pengetahuan yang Efektif dan Inovatif</p>
	<p>1.3. Membangun simpul jaringan/hub bagi pengelolaan pengetahuan organisasi masyarakat sipil di Indonesia.</p>	<p>Adanya sebuah jaringan/hub bagi pengelolaan pengetahuan organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang diorganisir melalui Sistem yang sudah dikembangkan</p>
	<p>1.4. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan reguler dan tematik bagi peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil di Indonesia dalam pengelolaan pengetahuan.</p>	<p>Adanya pelatihan-pelatihan reguler dan tematik bagi peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil di Indonesia dalam pengelolaan pengetahuan</p>
<p>2. Dikembangkannya riset dan metodologi riset pada isu-isu strategis pembangunan Indonesia, dalam kerangka kemitraan dengan aktor pembangunan lainnya.</p>	<p>2.1. Memetakan rencana kajian tematik per isu strategis melalui pengelolaan pengetahuan berkaitan dengan Isu dan Kebijakan Nasional</p>	<p>Adanya Pemetaan Kajian tematik Per Isu Strategis berkaitan dengan Isu dan Kebijakan Nasional</p>
	<p>2.2. Menyusun protokol riset per masing-masing tema.</p>	<p>Adanya protokol riset per masing-masing tema.</p>
	<p>2.3. Membangun kemitraan dan kolaborasi dengan para pihak di tingkat nasional maupun lokal sebagai basis pelaksanaan riset.</p>	<p>Adanya jaringan kemitraan dan kolaborasi dengan para pihak di tingkat nasional maupun lokal sebagai basis pelaksanaan riset.</p>
	<p>2.4. Menyelenggarakan riset (aksi) per masing-masing tema dan proses validasi hasil kajian melalui konsultasi publik.</p>	<p>Adanya konsultasi publik berkaitan dengan hasil riset (aksi) untuk setiap isu strategis</p>
	<p>2.5. Menyusun catatan, analisa dan rekomendasi</p>	<p>Adanya policy paper sebagai tindaklanjut hasil</p>

Output	Kegiatan	Output Kegiatan
	pengembangan dan pembaruan kebijakan.	riset (aksi) untuk setiap isu strategis
	2.6. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan reguler dan tematik bagi peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil di Indonesia dalam penggunaan riset dan metodologi riset sebagai basis intervensi program.	Pelatihan penggunaan riset dan metodologi riset sebagai basis intervensi program.
3. Menguatnya komunikasi, edukasi dan kesadaran publik melalui jejaring kampanye, lobi dan advokasi berbasis data dan bukti.	3.1. Membangun strategi dan kemampuan organisasi dalam komunikasi, edukasi dan kesadaran publik melalui jejaring kampanye, lobi dan advokasi berbasis data dan bukti.	Adanya strategi dan kemampuan organisasi dalam komunikasi, edukasi dan kesadaran publik melalui jejaring kampanye, lobi dan advokasi berbasis data dan bukti.
	3.2. Menyusun materi dan bahan-bahan kampanye dan publikasi hasil riset	Adanya materi dan bahan-bahan kampanye dan publikasi hasil kajian.
	3.3. Menyelenggarakan komunikasi/publikasi, edukasi dan kesadaran publik berdasarkan hasil kajian.	Terselenggaranya kampanye dan publikasi hasil kajian.
	3.4. Membangun jejaring advokasi yang efektif pada tingkat nasional.	Adanya jejaring advokasi yang efektif pada tingkat nasional
	3.5. Menyusun standar kebijakan dan prosedur (SOP) untuk aspek: Kelembagaan, Penelitian, Komunikasi dan Publikasi, SDM, Keuangan dan Administrasi.	Adanya Sistem dan prosedur (SoP) Kelembagaan, Penelitian, Komunikasi dan Publikasi, SDM, Keuangan dan Administrasi
4. Meningkatnya kapasitas, kapabilitas dan akuntabilitas organisasi agar dapat menjadi lembaga riset yang terpercaya dan diakui sebagai mitra strategis pembangunan pada skala nasional.	4.1. Menyusun Rencana Kerja dan Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Tahunan.	Adanya Perencanaan Riset Internal Kelembagaan
	4.2.	
	4.3. Mereview Rencana Strategis pada setiap periode/tahun	Adanya review Dokumen Rencana Strategis pada setiap periode/tahun
	4.4. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.	Adanya Rencana Kerja Tahunan

Output	Kegiatan	Output Kegiatan
	Melaksanakan serial pelatihan peningkatan kapasitas bagi staf internal.	Terselenggaranya pelatihan peningkatan kapasitas bagi staf internal.
	4.5. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi tahunan untuk pelaksanaan renstra	Terselenggaranya kegiatan pemantauan dan evaluasi tahunan untuk pelaksanaan renstra
	4.6. Membangun strategi dan model penggalan sumber daya bagi keberlanjutan organisasi.	Adanya strategi dan model penggalan sumber daya bagi keberlanjutan organisasi.

Tata Waktu

Output	Kegiatan	Tata Waktu				
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
1. Dikembangkannya sistem, media dan instrumen yang efektif dan inovatif bagi pengelolaan dan produksi/kreasi data, informasi dan pengetahuan bagi masyarakat sipil di Indonesia.	1.1. Membangun sistem dan model pengelolaan data, informasi dan pengetahuan yang sesuai dengan karakteristik organisasi masyarakat sipil di Indonesia.					
	1.2. Membangun sistem produksi/kreasi pengetahuan yang efektif dan inovatif.					
	1.3. Membangun simpul jaringan/hub bagi pengelolaan pengetahuan organisasi masyarakat sipil di Indonesia.					
	1.4. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan reguler dan tematik bagi peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil di Indonesia dalam pengelolaan pengetahuan.					
2. Dikembangkannya riset dan metodologi riset pada isu-isu strategis pembangunan Indonesia, dalam kerangka kemitraan dengan aktor pembangunan lainnya.	2.1. Memetakan rencana kajian tematik per isu strategis melalui pengelolaan pengetahuan berkaitan dengan Isu dan Kebijakan Nasional					
	2.2. Menyusun protokol riset per masing-masing tema.					
	2.3. Membangun kemitraan dan kolaborasi dengan para pihak di tingkat nasional maupun lokal sebagai basis pelaksanaan riset.					
	2.4. Menyelenggarakan riset (aksi) per masing-masing tema dan proses validasi hasil kajian melalui konsultasi publik.					
	2.5. Menyusun catatan, analisa dan rekomendasi pengembangan dan pembaruan kebijakan.					
	2.6. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan reguler dan tematik bagi peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil di Indonesia dalam penggunaan riset dan metodologi riset sebagai basis intervensi program.					

Output	Kegiatan	Tata Waktu				
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
3. Menguatnya komunikasi, edukasi dan penyadaran publik melalui jejaring kampanye, lobi dan advokasi berbasis data dan bukti.	3.1. Membangun strategi dan kemampuan organisasi dalam komunikasi, edukasi dan penyadaran publik melalui jejaring kampanye, lobi dan advokasi berbasis data dan bukti.					
	3.2. Menyusun materi dan bahan-bahan kampanye dan publikasi hasil riset					
	3.3. Menyelenggarakan komunikasi/publikasi, edukasi dan penyadaran publik berdasarkan hasil kajian.					
	3.4. Membangun jejaring advokasi yang efektif pada tingkat nasional.					
	3.5. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan multipihak dalam kerangka lobi dan advokasi kebijakan berbasis data dan bukti.					
4. Meningkatnya kapasitas, kapabilitas dan akuntabilitas organisasi agar dapat menjadi lembaga riset yang terpercaya dan diakui sebagai mitra strategis pembangunan pada skala nasional.	4.1. Menyusun standar kebijakan dan prosedur (SOP) untuk aspek: Kelembagaan, Penelitian, Komunikasi dan Publikasi, SDM, Keuangan dan Administrasi.					
	4.2. Menyusun Rencana Kerja dan Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Tahunan.					
	4.3. Mereview Rencana Strategis pada setiap periode/tahun					
	4.4. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.					
	4.5. Melaksanakan serial pelatihan peningkatan kapasitas bagi staf internal.					
	4.6. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi tahunan untuk pelaksanaan renstra					
	4.7. Membangun strategi dan model penggalan sumber daya bagi keberlanjutan organisasi.					

Rencana Anggaran

Output	Kegiatan	Pagu
1. Dikembangkannya sistem, media dan instrumen yang efektif dan inovatif bagi pengelolaan dan produksi/kreasi data, informasi dan pengetahuan bagi masyarakat sipil di Indonesia.	1.1. Membangun sistem dan model pengelolaan data, informasi dan pengetahuan yang sesuai dengan karakteristik organisasi masyarakat sipil di Indonesia.	50,000,000
	1.2. Membangun sistem produksi/kreasi pengetahuan yang efektif dan inovatif.	50,000,000
	1.3. Membangun simpul jaringan/hub bagi pengelolaan pengetahuan organisasi masyarakat sipil di Indonesia.	25,000,000
	1.4. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan reguler dan tematik bagi peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil di Indonesia dalam pengelolaan pengetahuan.	100,000,000
2. Dikembangkannya riset dan metodologi riset pada isu-isu strategis pembangunan Indonesia, dalam kerangka kemitraan dengan aktor pembangunan lainnya.	2.1. Memetakan rencana kajian tematik per isu strategis melalui pengelolaan pengetahuan berkaitan dengan Isu dan Kebijakan Nasional	25,000,000
	2.2. Menyusun protokol riset per masing-masing tema.	25,000,000
	2.3. Membangun kemitraan dan kolaborasi dengan para pihak di tingkat nasional maupun lokal sebagai basis pelaksanaan riset.	25,000,000
	2.4. Menyelenggarakan riset (aksi) per masing-masing tema dan proses validasi hasil kajian melalui konsultasi publik.	75,000,000
	2.5. Menyusun catatan, analisa dan rekomendasi pengembangan dan pembaruan kebijakan.	25,000,000
	2.6. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan reguler dan tematik bagi peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil di Indonesia dalam penggunaan riset dan metodologi riset sebagai basis intervensi program.	100,000,000
3. Menguatnya komunikasi, edukasi dan penyadaran publik melalui jejaring kampanye, lobi dan advokasi	3.1. Membangun strategi dan kemampuan organisasi dalam komunikasi, edukasi dan penyadaran publik melalui jejaring	25,000,000

Output	Kegiatan	Pagu
berbasis data dan bukti.	kampanye, lobi dan advokasi berbasis data dan bukti.	
	3.2. Menyusun materi dan bahan-bahan kampanye dan publikasi hasil riset	100,000,000
	3.3. Menyelenggarakan komunikasi/publikasi, edukasi dan penyadaran publik berdasarkan hasil kajian.	100,000,000
	3.4. Membangun jejaring advokasi yang efektif pada tingkat nasional.	100,000,000
	3.5. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan multipihak dalam kerangka lobi dan advokasi kebijakan berbasis data dan bukti.	100,000,000
4. Meningkatnya kapasitas, kapabilitas dan akuntabilitas organisasi agar dapat menjadi lembaga riset yang terpercaya dan diakui sebagai mitra strategis pembangunan pada skala nasional.	4.1. Menyusun standar kebijakan dan prosedur (SOP) untuk aspek: Kelembagaan, Penelitian, Komunikasi dan Publikasi, SDM, Keuangan dan Administrasi.	50,000,000
	4.2. Menyusun Rencana Kerja dan Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Tahunan.	25,000,000
	4.3. Mereview Rencana Strategis pada setiap periode/tahun	100,000,000
	4.4. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.	100,000,000
	4.5. Melaksanakan serial pelatihan peningkatan kapasitas bagi staf internal.	100,000,000
	4.6. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi tahunan untuk pelaksanaan renstra	100,000,000
	4.7. Membangun strategi dan model penggalan sumber daya bagi keberlanjutan organisasi.	75,000,000

TOTAL

1.475.000.000